

**LAPORAN KETERANGAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(LKPPD)
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024**



DESA : WATOTUTU
KECAMATAN : ILE MANDIRI
KABUPATEN : FLORES TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan penyelenggaraanNya kita masih diberikan kesempatan untuk berkarya demi membangun Desa kita dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata, dan atas berkat penyelenggaraanNya pula maka kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Desa Watotutu kecamatan Ile Mandiri kabupaten Flores Timur.

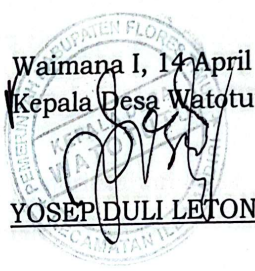
Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran adalah suatu kewajiban Kepala Desa untuk menyampaikan Laporan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 46 tahun 2016 tentang Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Akhir Tahun Anggaran ini memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selanjutnya pada pasal 9 Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran digunakan sebagai bahan evaluasi yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diemban atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Semoga bermanfaat bagi masyarakat Desa Watotutu dan Pemerintah pada umumnya demi kesinambungan pembangunan selanjutnya.

Waimana I, 14 April 2025

Kepala Desa Watotutu


YOSEP DULI LETON

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Tujuan
- B. Visi dan Misi
- C. Strategi dan Kebijakan Pembangunan

BAB II PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA

- A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan
- C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan
- D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat
- E. Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak

BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

- A. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
- B. Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
- C. Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
 - I. Pendapatan Desa
 - II. Belanja Desa
 - 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - 5. Bidang Tak Terduga
 - 6. Jumlah Belanja, dan
 - 7. Surplus/Defisit
 - III. Pembiayaan Desa
 - 1. Penerimaan Pembiayaan
 - 2. Pengeluaran Pembiayaan
 - 3. Selisih Pembiayaan

BAB IV KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

BAB V PENUTUP

Lampiran-lampiran

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

L P P D

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024

DESA WATOTUTU KECAMATAN ILE MANDIRI KABUPATEN FLORES TIMUR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tujuan

Pelaporan merupakan Salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa, sebagaimana yang ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu asas transparansi dan akuntabilitas. Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek antara lain aspek hukum, administrasi maupun moral. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa Watotutu sebagai bagian dari tak terpisahkan dari Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pelaporan ini sebagai salah satu wujud pengendalian pemerintahan Desa untuk;

a. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan

Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan untuk dilaporkan dan dievaluasi agar dapat mengetahui tujuan yang dicapai.

b. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, keberhasilan) terkait pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa.

Evaluasi ini tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi kinerja yang dicapai tetapi juga sebagai sarana untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik di masa mendatang.

c. Mengkomunikasikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat, sehingga masyarakat memiliki akses terhadap informasi tentang kinerja pemerintah Desa.

d. Menjadi dasar dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun-tahun mendatang.

Selanjutnya maksud dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran ini juga merupakan salah satu bahan atau alat pengendalian/evaluasi oleh Bupati Flores Timur, untuk menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan antara lain bermaksud untuk mengetahui kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.

Sedangkan tujuan dari penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Akhir Tahun Anggaran ini adalah untuk mempertanggungjawabkan seluruh proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat selama satu tahun anggaran.

B. Visi dan Misi

Agar pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terselenggara dengan baik dan terarah perlu direncanakan suatu strategi desa, yaitu telah ditempuh dengan penyusunan Dokumen dalam bentuk Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Desa (Enam tahunan) tahun 2020 s/d 2025, dengan penjabaran program dan kegiatan setiap tahun dalam wujud kegiatan baik fisik maupun non fisik yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahunan yang ditetapkan dalam Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Visi dan Misi Desa merupakan implementasi dari visi dan misi Kepala Desa terpilih dengan beberapa penambahan kegiatan yang disusun atau digali berdasarkan musyawarah Desa secara partisipatif, antara lain :

1. Visi : “ Menuju Desa Watotutu yang Bersatu, Maju, Mandiri dan Sejahtera “.
2. Misi : Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka diperlukan Penjabaran lebih terperinci dari visi, yang dituangkan di dalam Misi Desa sebagai berikut :
 - a. Misi Pertama :
Menciptakan Pemerintahan yang Demokratis, Partisipatif, Jujur, Terbuka, Adil dan Akuntabel.
 - b. Misi Ke dua :
Pembangunan/peningkatan infrastruktur dasar Desa.
 - c. Misi Ke tiga :
Pelestarian Adat Budaya Lewotamah.
 - d. Misi Ke empat :
Peningkatan Sumber Daya Manusia.
 - e. Misi Ke lima :
Peningkatan Ekonomi Masyarakat.
 - f. Misi Ke enam :
Peningkatan Pendapatan Asli Desa.

C. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa

1. Strategi Pembangunan Desa

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat

miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal. Dalam dokumen RKP Desa Tahun 2024 permasalahan Desa Watotutu Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek yang menjadi strategi dalam pembangunan di Desa, sebagai berikut:

A. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Desa Watotutu di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 5 (lima) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni ; 1). Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif, 2). Terwujudnya infrastruktur desa yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, 3). Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram dan sejahtera. 4) Terwujudnya Ketahanan Pangan Desa Sesuai dengan perpres 104 Tahun 2021. 5) Terwujudnya Program Jaring Pengaman Sosial atau JPS berupa Bantuan BLT Desa, PKH, BPNT dan Bantuan Lainnya bagi masyarakat Miskin. Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat disektor pertanian dan perdagangan. Yang titik akhirnya akan menekan angka kemiskinan.

B. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya di atasi oleh pemerintah Desa. Masalah tersebut meliputi: 1). Masih banyak tepian drainase sungai yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian atau Pembangunan. 2). Kurangnya jaringan draenase yang ada mengakibatkan air hujan lari kejalan sehingga merusak konstruksi jalan yang ada. 3). Sebagian jalan desa banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasarana transportasi dan ekonomi masyarakat.

C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Laju Pencapaian SDGs Desa

SDGS adalah singkatan dari Sustainable Development Goals (SDGS) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh pemimpin dunia termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan

dan melindungi lingkungan. Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan nasional (SDGs Nasional) hingga ke tingkat Desa, maka Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi menerbitkan Permendes PDTT Nomor 13 tahun 2020 yang berfokus pada SDGs Desa. Dalam regulasi ini mengatur tentang prioritas penggunaan dana Desa sebagai upaya untuk pencapaian SDGs Desa. SDGs Desa merupakan upaya konkret dalam membangun bangsa untuk pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan melalui upaya pencapaian SDGs Desa secara terpadu.

Berdasarkan laju pencapaian Data SDGs Desa tahun 2024 ini, Desa Watotutu Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur dalam mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa sesuai SDGs Desa, dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa berdasarkan akses data yang didapat dari Sistem Informasi Desa. Dari hal ini, evaluasi berdasarkan laju SDGs Desa tersebut Desa akan mengupayakan pencapaian SDGs Desa 8 (delapan) tipologi; Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan, Desa Ekonomi Tumbuh Merata, Desa Peduli Kesehatan, Desa Peduli Lingkungan, Desa Peduli Pendidikan, Desa Ramah Perempuan, Desa Berjejaringan, dan Desa Tanggap Budaya.

D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

2. Arah Kebijakan Program Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan Pedoman Perencanaan Pembangunan di tingkat Desa dan juga merupakan salah satu bagian dari proses pembangunan partisipatif ke depan. Dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat sebagai wujud partisipasi aktif masyarakat mulai dari tahapan identifikasi masalah, pemetaan potensi hingga pada perumusan programnya.

Arah kebijakan pembangunan Desa telah termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagai pijakan pencapaian berdasarkan tujuannya yakni meningkatkan pembangunan manusia melalui bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang Pelaksanaan Pembangunan, bidang Pembinaan Masyarakat, dan bidang Pemberdayaan Masyarakat.

3. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

BAB II

PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA

Program kerja dan kegiatan pembangunan di Desa Watotutu yang disusun dalam Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 yang sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 ini, benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi local serta pemanfaatan Sumber Daya Alam lingkungan secara berkelanjutan.

Uraian program dan kegiatan berdasarkan bidang-bidang yang menjadi kewenangan Desa, adalah sebagai berikut :

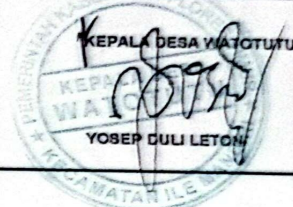
TAHUN 2024

DESA : PEMERINTAH DESA WATOTUTU
KECAMATAN : KECAMATAN ILE MANDIRI
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN FLORES TIMUR
PROVINSI : PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA											
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Watotutu	1 orang	Kades, meningkatkan kesejahteraan	12 bulan	33.000.000,00	ADD	✓			KASIE PEMERINTAHAN
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	RT 01/Dsn I Desa Watotutu	10 orang	Perangkat Desa, meningkatkan kesejahteraan	12 bulan	245.090.640,00	ADD	✓			KASIE PEMERINTAHAN
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa Watotutu	1 paket	Pemdes/meningkatkan kinerja	12 bulan	22.975.000,00	ADD	✓			KASIE PEMERINTAHAN
		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Watotutu	9 orang	BPD/meningkatkan kesejahteraan anggota BPD	12 bulan	56.400.000,00	ADD	✓			KASIE PEMERINTAHAN
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Desa Watotutu	1 paket	BPD/meningkatkan kinerja BPD	12 bulan	14.205.000,00	ADD	✓			KASIE PEMERINTAHAN
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Desa Watotutu	1 paket	Pemdes/meningkatkan kinerja	12 bulan	20.400.000,00	DDS	✓			KASIE PEMERINTAHAN
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	Desa Watotutu	1 paket	Pemdes/tersusunnya/terdatanya Profil Desa	12 bulan	12.497.500,00	DDS	✓			KASIE PEMERINTAHAN
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Watotutu	1 paket	Masy/meningkatkan partisipasi masyarakat	6 bulan	6.650.000,00	DDS	✓			KASIE PEMERINTAHAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa Watotutu	1 paket	Pemdes/ Dokumen Perencanaan	3 bulan	13.270.000,00	DDS	✓			KASIE PEMERINTAHAN
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Watotutu	1 paket	Masy/ sistem informasi Desa	12 bulan	8.670.000,00	DDS	✓			KASIE PEMERINTAHAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	(RT / RW DUSUN)	VOLUME	SARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KEPJA SAMA	PIHAK KETIGA	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		JUMLAH PER BIDANG					433.158.140,00					
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Desa Watotutu	1 paket	Guru, Siswa/meningkatkan mutu Pendidikan	12 bulan	103.340.000,00	DDS	✓			KASIE PEMBANGUNAN
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Desa Watotutu	1 paket	masy/meningkatkan kesehatan masy	12 bulan	69.340.000,00	DDS	✓			KASIE PEMBANGUNAN
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kjs Bumil, Lamsia, Insentif)	Desa Watotutu	1 paket	Kader Posyandu/meningkatkan pelayanan	12 bulan	85.345.000,00	DDS	✓			KASIE PEMBANGUNAN
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa Watotutu	30 orang	Tenaga Kesehatan, Kader/Meningkatkan kesehatan	2 hari	10.540.000,00	DDS	✓			KASIE PEMBANGUNAN
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	Dusun I/II/III	200 M	masy/pembangunan jalan Lingkungan	3 bulan	200.000.000,00	DDS	✓			KASIE PEMBANGUNAN
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Dsn I/II/III	3 unit	Masy/meningkatkan kelayakan hunian masy.	3 bulan	37.500.000,00	DDS	✓			KASIE PEMBANGUNAN
		JUMLAH PER BIDANG					508.065.000,00					
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN											
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Desa Watotutu	1 paket	Linmas/meningkatkan keamanan & ketertiban masy	12 bulan	12.000.000,00	DDS	✓			KASIE KESEJAHTERAA
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Desa Watotutu	1 kali	Masy/meningkatkan kesenian Desa	1 bulan	8.055.983,00	DDS	✓			KASIE KESEJAHTERAA
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	Desa Watotutu	4 kali	Kaum muda/Meningkatkan dan pengembangan	2 bulan	9.480.000,00	DDS	✓			KASIE KESEJAHTERAA
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan Lembaga Adat	Desa Watotutu	1 paket	LA/meningkatkan kinerja lembaga adat	12 bulan	15.600.000,00	DDS	✓			KASIE KESEJAHTERAA
		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Watotutu	1 paket	Katua RT/meningkatkan kinerja	12 bulan	12.000.000,00	DDS	✓			KASIE KESEJAHTERAA

KD	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	(RT / RW DUSUN)	VOLUME	MANFAAT	PELAKSANAAN	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KEPUA SAMA	PIHAK KETIGA	RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan PKK	Desa Watotutu	1 paket	TP.PKK/meningkatkan kinerja		19.500.000,00	DDS	✓			KASIE KESBAHATERPAK
JUMLAH PER BIDANG							79.635.983,00					
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Sub Bidang Pertanian dan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	Desa Watotutu	1 paket	Masy/mentingkatkan produksi tanaman pangan	6 bulan	39.150.000,00	DDS	✓			KASIE KESBAHATERPAK
		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	Desa Watotutu	100 ekor	masy/mentingkatkan produksi peternakan	3 bulan	170.000.000,00	DDS	✓			KASIE KESBAHATERPAK
		Pengusutan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Desa Watotutu	1 paket	masy/mentingkatkan ketahanan pangan	1 bulan	95.000.000,00	DDS	✓			KASIE KESBAHATERPAK
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa Watotutu	1 orang	Kades/mentingkatkan Kapasitas Kades	1 minggu	0,00	DDS	✓			KASIE KEMASYARAKAT
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Desa Watotutu	1 paket	Kel.pemampuan meningkatkan usaha ekonomi	3 bulan	11.105.000,00	DDS	✓			KASIE KESBAHATERPAK
JUMLAH PER BIDANG							315.255.000,00					
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	Sub Bidang Peninggulangan Bencana	Desa Watotutu	12 kali	masy/mentatasi penanggulangan bencana	12 bulan	6.725.000,00	DDS	✓			KASIE KESBAHATERPAK
		Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Watotutu	40 KK	masy/mentatasi penanganan keadaan darurat	12 bulan	144.000.000,00	DDS	✓			KASIE KESBAHATERPAK
JUMLAH PER BIDANG							150.725.000,00					

KD	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	(RT / RW DUSUN)	VOLUME	SARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KEPJA SAMA	PIHAK KETIGA	RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JUMLAH TOTAL							1.481.839.123,00					
												

BAB III

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Dalam pengelolaan keuangan Desa, Pemerintah Desa Watotutu telah melaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang dalam penggunaan lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan terbuka (Good Government).

Selain pengelolaan keuangan secara terbuka dan akuntabel, pemerintah Desa Watotutu telah melakukan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada bagian ini memuat uraian tentang :

1. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Watotutu Tahun Anggaran 2024,
2. Peraturan Kepala Desa Watotutu Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
3. Peraturan Desa Watotutu Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
4. Peraturan Kepala Desa Watotutu Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
5. Rincian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024, terdiri dari :

1. Pendapatan Desa;
2. Belanja Desa, terdiri dari :
 - a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - e) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Medesak
 - f) Jumlah Belanja
 - g) Surplus/Defisit
3. Pembiayaan, terdiri dari :
 - a) Penerimaan Pembiayaan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan

c) Selisih Pembiayaan

6. Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Setelah berakhirnya Tahun Anggaran maka Pemerintah Desa berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dengan peraturan Desa, yakni Peraturan Desa Nomor 1. Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Watotutu Tahun Anggaran 2024.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang memuat uraian tentang Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

BAB IV

KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA/SOLUSI YANG DITEMPUH

Adapun keberhasilan dan permasalahan serta upaya yang ditempuh dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dapat diuraikan dalam table di bawah ini :

Table 1

Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan Dihadapi & Upaya Yang Ditempuh bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	UPAYA YANG DITEMPUH
1	Bidang Penyelenggar an Pemerintah n Desa	1. Pendapatan Desa yang bersumber Dana Transfer 2. Tersusunnya Dokumen Perencanaan & Keuangan Desa 3. Pengelolaan & Penatausahaan Administrasi Desa	1. Pendapatan Desa minim yang bersumber dari dana transfer. 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan & Keuangan tidak sesuai dengan waktunya. 3. Kurangnya pemahaman Peraturan Perundang-undangan tentang Tata Kelola Pemerintahan DEsa	1. Perlu meningkatkan PADesa 2. mengatur waktu sesuai dengan ketentuan. 3. Pengadaan Dokumen Peraturan Perundang- undangan & menyediakan waktu untuk belajar

Table 2

Keberhasilan, Permasalahan yang dihadapi & Upaya yang ditempuh Bidang
Pelaksanaan Pembangunan Desa,

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	UPAYA YANG DITEMPUH
1	Bidang Pelaksanaan Pembanguna n Desa	1. terlaksananya pembangunan/reh abilitasi jalan pemukiman	1. masih terdapat ruas jalan yang rusak	1. melakukan penyusunan kembali perencanaan pembangunan Desa 2. meningkatkan pendapatan Desa

Table 3

Keberhasilan Yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi & Upayah yang ditempuh
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	UPAYA YANG DITEMPUH
----	--------	------------------------------	-------------------------------	---------------------

1	Bidang Kemasyarakatan Desa	1.terlaksananya pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	1. ada lembaga kemasyarakatan secara jumlah keanggotaan tidak memenuhi ketentuan	1.perlu dilakukan pembenahan
		2.terlaksananya kegiatan penyelenggaraan HUT RI/Raya Kenegaraan	1.penggunaan anggaran tidak sesuai sumber dana (BHP) karena keterlambatan pentransferan	1.percepatan penyetoran PBB 2.perlu adanya PADes

Table 4
Keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi & Upayah yang ditempuh Bidang Pemberdayaan Masyarakat

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	UPAYA YANG DITEMPUH
1	Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	1.terlaksananya program pendampingan kelompok ekonomi masyarakat	1.belum ada data yang valid terkait kelompok ekonomi	1.pendataan kelompok usaha ekonomi di desa

Table 5
Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi & Upayah yang ditempuh bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat & Keadaan Mendesak

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	UPAYA YANG DITEMPUH
1	Bidang Penanggulan gan Bencana, Keadaan Darurat & Keadaan Mendesak Desa	1.terlaksananya program penurunan kemiskinan di desa	1. kesulitan dalam menetapkan keluarga penerima manfaat	1. perlu dilakukan pendataan

BAB V PENUTUP

1. KESIMPULAN LAPORAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa maka Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Akhir Tahun Anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Laporan dan pertanggungjawaban merupakan siklus terakhir dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan. Di akhir laporan ini kami dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Dasar penyusunan Laporan Akhir Tahun Anggaran pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2016;
- b. Tahapan perencanaan yang merujuk pada Peraturan Desa Tentang RKP Desa Watotutu Nomor 3 Tahun 2023;
- c. Pelaksanaan Program kegiatan berdasarkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024, dan pertanggungjawaban kegiatan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- d. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Watotutu;
- e. Semua kegiatan berjalan dengan lancar meskipun masih terdapat hambatan pada saat pelaksanaan.

2. UCAPAN TERIMA KASIH

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan campur tanganNya maka penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 ini dapat terselesaikan. Tak lupa kami sampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Watotutu Akhir Tahun Anggaran 2024, antara lainnya kepada :

- a. Kepada Pemerintahan Kabupaten Flores Timur dan Pemerintahan Kecamatan Ile Mandiri atas bantuan dalam penyusunan Laporan ini;
- b. Kepada Tim dari Pemerintah Desa Watotutu yang telah bekerjasama dalam penyusunan Laporan ini.

3. SARAN

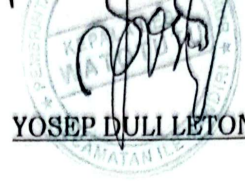
Dalam penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Watotutu Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur ini masih banyak kekurangan

naka kami mengharapkan usul saran dan masukan demi penyempurnaan Laporan-
aporan Kepala Desa ke depannya.

Demikian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Watotutu Tahun
anggaran 2024 ini dibuat sebagai bahan evaluasi seperlunya.

Waimana I, 14 April 2025

KEPALA DESA WATOTUTU



YOSEP DULI LETON

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024 (format A.1).
2. Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024 (format A.2).
3. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024 (format B).
4. Rincian Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (format C1)
5. Rincian Kegiatan Bidang Pembangunan Desa (format C2)
6. Rincian Kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat (format C3)
7. Rincian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (format C4)
8. Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk pada Akhir Bulan Desember Tahun 2024



KEPALA DESA WATOTUTU
KECAMATAN ILE MANDIRI KABUPATEN FLORES TIMUR

PERATURAN DESA WATOTUTU
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WATOTUTU
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WATOTUTU

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, (Lembaran Negara Republik

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
an DAN BELANJA DESA WATOTUTU TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa WATOTUTU Tahun Anggaran adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.302.068.623,00
2. Belanja Desa	Rp	1.319.532.023,00
Surplus/Defisit	Rp	17.463.400,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	17.463.400,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	17.463.400,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

Indonesia Tahun 2023, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyelauran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 1052);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
9. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 Nomor 64);
12. Peraturan Desa Watotutu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Watotutu Tahun 2023 Nomor 3)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WATOTUTU

Dan

KEPALA DESA WATOTUTU

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

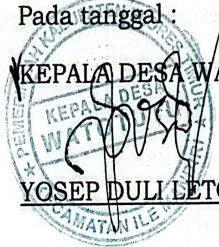
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa WATOTUTU.

Ditetapkan di : WATOTUTU

Pada tanggal : 29 Desember 2023

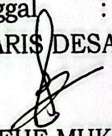
KEPALA DESA WATOTUTU,


YOSEP DULI LETON

Diundangkan di : WATOTUTU

Pada tanggal : 29 Desember 2023

SEKRETARIS DESA WATOTUTU


PETRUS EHE MUKIN

LEMBARAN DESA WATOTUTU NOMOR 4 TAHUN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WATOTUTU
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.297.147.623,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.921.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.302.068.623,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	334.490.640,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	732.670.958,92	
5.3.	Belanja Modal	104.770.424,08	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	147.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.319.532.023,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(17.463.400,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	17.463.400,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	17.463.400,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	17.463.400,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WAIMANA I, 29 Desember/2023

KEPALA DESA WATOTUTU

YOSEP DULI LETON

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WATOTUTU
TAHUN ANGGARAN 2024

jenis APBDes : APBDes Awal

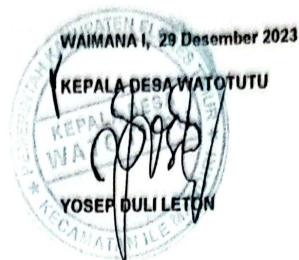
KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.297.147.623,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.921.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.302.068.623,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>419.284.140,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	369.811.640,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.090.640,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	245.090.640,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	9.716.000,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.716.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	56.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	56.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.205.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.205.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	20.400.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.600.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.497.500,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	12.497.500,00	DDS, DLL
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.497.500,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	36.975.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.650.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.650.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.500.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	13.270.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.270.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3.885.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.885.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	8.670.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.670.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>364.056.900,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	75.740.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	75.740.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.740.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	165.225.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	69.340.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.200.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	14.140.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	85.345.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.040.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	2.305.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	10.540.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.540.000,00	
2.2.03	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	89.105.424,08	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	89.105.424,08	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.780.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	85.325.424,08	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	30.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.986.475,92	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	3.986.475,92	DDS
2.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.986.475,92	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>84.785.983,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	17.300.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	14.100.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.100.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.200.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	13.270.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.270.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Kuangan)	3.885.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.885.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	8.670.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.670.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>364.056.900,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	75.740.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	75.740.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.740.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	165.225.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	69.340.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.200.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	14.140.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	85.345.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.040.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	2.305.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	10.540.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.540.000,00	
2.2.03	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	89.105.424,08	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	89.105.424,08	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.780.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	85.325.424,08	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	30.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.986.475,92	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	3.986.475,92	DDS
2.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.986.475,92	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>84.785.983,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	17.300.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	14.100.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.100.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.200.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	8.055.983,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	8.055.983,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.055.983,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	9.480.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec /Kab/Kota	9.480.000,00	DDS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.480.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	49.950.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	17.850.000,00	DDS
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.850.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12.000.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.100.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.100.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	307.405.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	292.900.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggiliran)	27.900.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.900.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	170.000.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	95.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.400.000,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	1.650.000,00	DLL
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.750.000,00	DLL
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	11.105.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	11.105.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.105.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	144.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	144.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	144.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.319.532.023,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(17.463.400,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	17.463.400,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTC	17.463.400,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



- Menyebut :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2014 tentang
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2014 tentang
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2014 tentang
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2014 tentang
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2014 tentang
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2014 tentang
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2014 tentang
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 57);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 20194);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1203);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran Dan Penggunaan Tahun Anggaran 2024;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 352 Tahun 2024 Tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Desa Watotutu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

Badan Permusyawaratan Desa

Dan

Kepala Desa Watotutu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WATOTUTU TAHUN
ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, dengan rincian
sebagai berikut :

No	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/(berk urang)
1.	Pendapatan Desa	1.302.068.623, 00	1.446.584.623, 00	144.516.000,00
2.	Belanja Desa			
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	419.284.140,00	447.529.140,00	28.245.000,00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	364.056.900,00	493.037.900,00	128.981.000,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	84.785.983,00	73.825.983,00	10.960.000,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	307.405.000,00	305.655.000,00	1.750.000,00
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat & Mendesak Desa	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00
	Jumlah Belanja	1.319.532.023, 00	1.464.048.023, 00	144.516.000,00
	Surplus/(Defisit)	17.463.400,00	17.463.400,00	0,00
3.	Pembiayaan Desa			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	17.463.400,00	17.463.400,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	Selisih Pembiayaan (3.1 - 3.2)	17.463.400,00	17.463.400,00	0,00
	Sisa lebih / (kurang) Perhitungan setelah Perubahan	0,00	0,00	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Desa.

Pasal 4

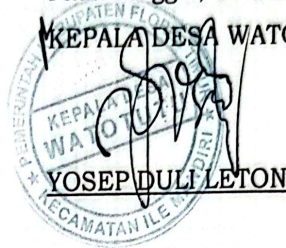
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Watotutu.

Ditetapkan - di Waimana I

Pada tanggal, 17 Oktober 2024

KEPALA DESA WATOTUTU



YOSEP DULILETON

Diundangkan - di Waimana I

Pada tanggal, 17 Oktober 2024

SEKRETARIS DESA WATOTUTU

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Village Secretary, Petrus EHE MUKIN.

PETRUS EHE MUKIN

Lembaran Desa Watotutu Tahun 2024 Nomor 2

Nomor : 2
Tahun : 2024

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WATOTUTU
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.2.	Pendapatan Transfer	1.297.147.623,00	1.441.663.623,00	144.516.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.921.000,00	4.921.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.302.068.623,00	1.446.584.623,00	144.516.000,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	334.490.640,00	334.490.640,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	732.670.958,92	736.987.702,65	4.316.743,73	
5.3.	Belanja Modal	104.770.424,08	244.969.680,35	140.199.256,27	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.319.532.023,00	1.464.048.023,00	144.516.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(17.463.400,00)	(17.463.400,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	17.463.400,00	17.463.400,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	17.463.400,00	17.463.400,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	17.463.400,00	17.463.400,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

WAIMANA I, 17 Oktober 2024

KEPALA DESA WATOTUTU

YOSEP DULI LETON

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WATOTUTU
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.297.147.623,00	1.441.663.623,00	144.516.000,00	
	4.2.1.	Dana Desa	944.601.000,00	1.089.117.000,00	144.516.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	8.055.983,00	8.055.983,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	344.490.640,00	344.490.640,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.921.000,00	4.921.000,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	4.921.000,00	4.921.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.302.068.623,00	1.446.584.623,00	144.516.000,00	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>419.284.140,00</u>	<u>447.529.140,00</u>	<u>28.245.000,00</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>369.811.640,00</u>	<u>371.761.640,00</u>	<u>1.950.000,00</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.090.640,00	245.090.640,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	245.090.640,00	245.090.640,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	9.716.000,00	9.716.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.716.000,00	8.416.000,00	(1.300.000,00)	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	5.205.000,00	5.205.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.205.000,00	5.205.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	20.400.000,00	22.350.000,00	1.950.000,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	18.750.000,00	1.950.000,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.497.500,00	44.192.500,00	31.695.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	12.497.500,00	44.192.500,00	31.695.000,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.497.500,00	21.442.500,00	8.945.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	22.750.000,00	22.750.000,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	36.975.000,00	31.575.000,00	(5.400.000,00)	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	6.650.000,00	7.250.000,00	600.000,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.650.000,00	7.250.000,00	600.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Re	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	13.270.000,00	13.270.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.270.000,00	13.270.000,00	0,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuanga	3.885.000,00	3.885.000,00	0,00	
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.885.000,00	3.885.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	8.670.000,00	2.670.000,00	(6.000.000,00)	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.670.000,00	2.670.000,00	(6.000.000,00)	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	364.056.900,00	493.037.900,00	128.981.000,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	75.740.000,00	77.240.000,00	1.500.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h	75.740.000,00	77.240.000,00	1.500.000,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.740.000,00	77.240.000,00	1.500.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>165.225.000,00</u>	<u>161.625.000,00</u>	<u>(3.600.000,00)</u>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, Kt	69.340.000,00	69.340.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.200.000,00	57.600.000,00	2.400.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	14.140.000,00	11.740.000,00	(2.400.000,00)	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	<u>85.345.000,00</u>	<u>81.745.000,00</u>	<u>(3.600.000,00)</u>	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.040.000,00	79.440.000,00	(3.600.000,00)	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	2.305.000,00	2.305.000,00	0,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kade	<u>10.540.000,00</u>	<u>10.540.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.540.000,00	7.540.000,00	0,00	
2.2.03	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>89.105.424,08</u>	<u>212.621.424,08</u>	<u>123.516.000,00</u>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perm	89.105.424,08	212.621.424,08	123.516.000,00	
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.780.000,00	8.746.743,73	4.966.743,73	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	85.325.424,08	203.874.680,35	118.549.256,27	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	<u>30.000.000,00</u>	<u>30.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<u>3.986.475,92</u>	<u>11.551.475,92</u>	<u>7.565.000,00</u>	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	3.986.475,92	11.551.475,92	7.565.000,00	
2.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.986.475,92	11.551.475,92	7.565.000,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	<u>84.785.983,00</u>	<u>73.825.983,00</u>	<u>(10.960.000,00)</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>17.300.000,00</u>	<u>10.240.000,00</u>	<u>(7.060.000,00)</u>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	14.100.000,00	7.040.000,00	(7.060.000,00)	
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.100.000,00	7.040.000,00	(7.060.000,00)	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
3	4	5	6	7		
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>8.055.983,00</u>	<u>8.055.983,00</u>	<u>0,00</u>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I	8.055.983,00	8.055.983,00	0,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.055.983,00	8.055.983,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>9.480.000,00</u>	<u>9.480.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/	9.480.000,00	9.480.000,00	0,00	
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.480.000,00	9.480.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>49.950.000,00</u>	<u>46.050.000,00</u>	<u>(3.900.000,00)</u>	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	17.850.000,00	13.950.000,00	(3.900.000,00)	
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.850.000,00	13.950.000,00	(3.900.000,00)	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<u>307.405.000,00</u>	<u>305.655.000,00</u>	<u>(1.750.000,00)</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>292.900.000,00</u>	<u>292.900.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilir.	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00	
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	<u>3.400.000,00</u>	<u>1.650.000,00</u>	<u>(1.750.000,00)</u>	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
4	5	6	7	8	9	10
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	11.105.000,00	11.105.000,00	0,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi	11.105.000,00	11.105.000,00	0,00	
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.105.000,00	11.105.000,00	0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	1.319.532.023,00	1.464.048.023,00	144.516.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(17.463.400,00)	(17.463.400,00)	0,00	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	17.463.400,00	17.463.400,00	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	17.463.400,00	17.463.400,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	17.463.400,00	17.463.400,00	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

WAIMANA I, 17 Oktober 2024
 KEPALA DESA WATOTUTU
 YOSEP DULI LETON



KEPALA DESA WATOTUTU
KABUPATEN FLORES TIMUR

PERATURAN DESA WATOTUTU
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WATOTUTU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat**
1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembara Negara RI Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan organisasi & Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 6);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara RI Nomor 1037 tahun 2016)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1099);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara RI Tahun Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa & Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara RI tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 530);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Penggunaan Dana Desa (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 868)

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi Nomor 13 tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran & Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara RI tahun 2023 Nomor 1051);
14. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Desa Watotutu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Watotutu Tahun 2023 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WATOTUTU

DAN

KEPALA DESA WATOTUTU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WATOTUTU TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, dengan perincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp. 1.442.196.089,96
2.	Belanja Desa	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 434.289.148,00
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 489.324.141,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 70.625.983,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 287.985.000,00
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 144.000.000,00

Jumlah Belanja	Rp. 1.426.224.272,00
Surplus/(deficit)	Rp. 15.971.817,96
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 15.971.817,96
b. <u>Pengeluaran Pembiayaan</u>	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih pembiayaan (a-b)	Rp. 15.971.817,96

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

- Lampiran I : Laporan Keuangan
- Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2024.
- Lampiran III: Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

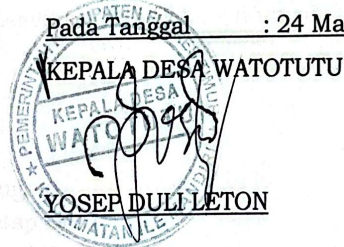
Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Waimana I

Pada Tanggal : 24 Maret 2025



Diundangkan di : Waimana I
 Pada Tanggal : 24 Maret 2025
 SEKRETARIS DESA WATOTUTU

PETRUS EHE MUKIN
 LEMBARAN DESA WATOTUTU TAHUN 2025 NOMOR 1

Lampiran I Peraturan Desa Watotutu
 Nomor 1 Tahun 2025
 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2024

Laporan Keuangan
 Pemerintah Desa Watotutu Kecamatan Ile Mandiri
 Kabupaten Flores Timur
 Tahun Anggaran 2024

	Daftar Isi	halaman
I.	Laporan Realisasi APBDesa	x
II.	Catatan Atas Laporan Keuangan	x
	A. Informasi Umum	x
	B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan	
	C. Rincian Pos Laporan Realisasi Keuangan	
	1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas	
	2. Pendapatan Asli Desa	
	3. Dana Desa	x
	4. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	x
	5. Alokasi Dana Desa	x
	6. Bantuan Keuangan Propinsi	x
	7. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	x
	8. Pendapatan Lain-lain	x
	9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	x
	10. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	x
	11. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	x
	12. Belanja Bidang Pemberdayaan Keamsyarakatan Desa	x
	13. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Dan Mendesak Desa	x
	14. Belanja Desa dan Klasifikasi Ekonomi	x
	15. Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	x
	16. Pembiayaan	x
	17. Aset Desa	x
	18. Penyertaan Modal	x
	Lampiran	
	Lampiran I : Laporan Keuangan	x
	Lampiran II : Rincian Aset Tetap Desa	x
	Lampiran III : Laporan Realisasi Kegiatan	x

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA WATOTUTU
KECAMATAN ILE MANDIRI
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Transfer		1.441.663.623,00	1.438.923.631,00	2.739.992,00
Dana Desa		1.089.117.000,00	1.089.117.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		8.055.983,00	8.055.983,00	0,00
Alokasi Dana Desa		344.490.640,00	341.750.648,00	2.739.992,00
Pendapatan Lain-lain		4.921.000,00	3.272.458,96	1.648.541,04
JUMLAH PENDAPATAN		1.446.584.623,00	1.442.196.089,96	4.388.533,04
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		447.529.140,00	434.289.148,00	13.239.992,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		493.037.900,00	489.324.141,00	3.713.759,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		73.825.983,00	70.625.983,00	3.200.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		305.655.000,00	287.985.000,00	17.670.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		144.000.000,00	144.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		1.464.048.023,00	1.426.224.272,00	37.823.751,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(17.463.400,00)	15.971.817,96	(33.435.217,96)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		17.463.400,00	0,00	17.463.400,00
PEMBIAYAAN NETTC		17.463.400,00	0,00	17.463.400,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	15.971.817,96	(15.971.817,96)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

WAIMANA 1, 31 Desember 2024
KEPALA DESA WATOTUTU

YOSEP DULI LETON

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA PEMERINTAH DESA WATOTUTU, KECAMATAN ILE MANDIRI
TAHUN ANGGARAN 2024

A. Informasi Umum

PEMERINTAH DESA WATOTUTU merupakan desa di KECAMATAN ILE MANDIRI, KABUPATEN FLORES TIMUR. Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor Tanggal, saat ini kepengurusan PEMERINTAH DESA WATOTUTU sebagai berikut:

1. Kepala Desa : YOSEP DULI LETON
2. Sekretaris Desa : PETRUS EHE MUKIN
3. Kaur Keuangan : PETRUS DULI LETON

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas, dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

I. SILPA Akhir Tahun Sebelumnya (Saldo Kas Akhir Tahun Sebelumnya – Hutang Pajak)		22.387.144,54
Mutasi Pajak:		
1. Saldo Awal Periode Pot. Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	0,00	
2. Penerimaan Pajak Tahun Anggaran berjalan	31.551.001,00	
3. Setoran Pajak Tahun Anggaran berjalan	31.551.001,00	
II. Saldo Akhir Pajak yang belum disetor ke Kas Negara (1+2-3)		0,00
Mutasi Penerimaan:		
1. Penerimaan Pendapatan Desa	1.442.196.089,96	
2. Penerimaan Pembiayaan Desa (selain SILPA)	0,00	
III. Jumlah Mutasi Penerimaan (1+2)		1.442.196.089,96
Mutasi Pengeluaran:		
1. Pengeluaran Belanja Desa	1.426.224.272,00	
2. Pengeluaran Pembiayaan Desa	0,00	
IV. Jumlah Mutasi Pengeluaran (1+2)		1.426.224.272,00
Mutasi Panjar		
1. Pemberian Panjar	1.446.804.031,00	
2. SPJ Panjar	1.426.070.272,00	

3. Pengembalian Sisa Panjar	20.733.759,00	
V. Sisa Panjar yang belum dikembalikan ke Kas Desa (1-2-3)		0,00
VI. Biaya Admin Bank yang tidak dianggarkan pada APBDes		0,00
VII. Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran Berjalan (I+II+III-IV-V-VI)		38.358.962,50

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Hasil Usaha Desa	0,00	0,00	0,00
Hasil Aset Desa	0,00	0,00	0,00
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

Melakukan pendataan potensi Desa yang dijadikan subyek pendapatan Desa yang

Disusun dengan peraturan Desa.

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Dana Desa	1.089.117.000,00	1.089.117.000,00	0,00

Ada peningkatan pendapatan transfer/Dana Desa, Desa mendapatkan alokasi kinerja

4. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan desa yang berasal dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	8.055.983,00	8.055.983,00	0,00

{keterlambatan transfer dari rekening Kas Daerah ke rekening Kas Desa akibat keterlambatan penyetoran PBB oleh Desa}

5. Alokasi Dana Desa

Penerimaan desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Alokasi Dana Desa (ADD)	344.490.640,00	341.750.648,00	2.739.992,00

Keterangan :

1. Terdapat kekurangan pendapatan pada rekening Kas Desa senilai Rp. 2.739.992,00.- untuk pembayaran BPJS bagi Kepala Desa & Perangkat oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
2. Kekurang tersebut merupakan pembayaran 1% atas kewajiban iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa & Perangkat Desa yang dibayarkan secara langsung oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur ke rekening BPJS.

6. Bantuan Keuangan Provinsi

Penerimaan desa yang berasal dari Bantuan Keuangan PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	0,00	0,00

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Penerimaan desa yang berasal dari Bantuan Keuangan PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	0,00	0,00

8. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Lain-lain terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	0,00	0,00	0,00
Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	0,00	0,00	0,00
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
Bunga Bank	4.921.000,00	3.272.458,96	1.648.541,04
Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah	4.921.000,00	3.272.458,96	1.648.541,04

9. Belanja – Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	334.490.640,00	331.750.648,00	2.739.992,00

Belanja Barang dan Jasa	85.388.500,00	74.888.500,00	10.500.000,00
Belanja Modal	24.050.000,00	24.050.000,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
Jumlah	447.529.140,00	434.289.148,00	20.439.992,00

Keterangan:

Belanja Pegawai tidak direalisasikan sampai dengan 100% karena ada kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan sebesar 1% dari 5% yang dipotong & ditransfer langsung oleh Pemda ke rekening BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa & Perangkat Desa.

10. Belanja – Bidang Pembangunan Desa

Belanja Bidang Pembangunan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	272.118.219,65	271.215.000,00	903.219,65
Belanja Modal	220.919.680,35	218.109.141,00	2.810.539,35
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	493.037.900,00	489.324.141,00	3.713.759,00

11. Belanja – Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	73.825.983,00	70.625.983,00	3.200.000,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	73.825.983,00	70.625.983,00	3.200.000,00

12. Belanja – Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	305.655.000,00	287.985.000,00	17.670.000,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	305.655.000,00	287.985.000,00	17.670.000,00

13. Belanja – Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00

Jumlah	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00
--------	----------------	----------------	------

14. Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi

Jumlah Belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	32.670.000,00	330.000,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.090.640,00	242.680.648,00	2.409.992,00
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00
Tunjangan BPD	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00
Jumlah	334.490.640,00	331.750.648,00	2.739.992,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Barang Perlengkapan	134.993.702,65	120.887.483,00	14.106.219,65
Belanja Jasa Honorarium	363.425.000,00	347.775.000,00	15.650.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	25.650.000,00	23.675.000,00	1.975.000,00
Belanja Jasa Sewa	3.255.000,00	3.255.000,00	0,00
Belanja Operasional Perkantoran	2.514.000,00	2.374.000,00	140.000,00
Belanja Pemeliharaan	500.000,00	500.000,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	206.650.000,00	206.248.000,00	402.000,00
Jumlah	736.987.702,65	704.714.483,00	32.273.219,65

c. Belanja Modal

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	41.095.000,00	41.095.000,00	0,00
Belanja Modal Kendaraan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	203.874.680,35	201.064.141,00	2.810.539,35
Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainas	0,00	0,00	0,00

e/Air			
Limbah/Persampahan			
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	244.969.680,35	242.159.141,00	2.810.539,35

d. Belanja Tidak Terduga

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Tidak Terduga	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00
Jumlah	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00

15. Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	371.761.640,00	367.056.648,00	4.704.992,00
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	44.192.500,00	44.192.500,00	0,00
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	31.575.000,00	23.040.000,00	8.535.000,00
Sub Bidang Pertanahan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	447.529.140,00	434.289.148,00	13.239.992,00

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Pendidikan	77.240.000,00	77.240.000,00	0,00
Sub Bidang Kesehatan	161.625.000,00	161.625.000,00	0,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	212.621.424,08	209.310.141,00	3.311.283,08
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	30.000.000,00	29.598.000,00	402.000,00
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Perhubungan,	11.551.475,92	11.551.000,00	475,92

Komunikasi dan Informatika			
Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00
Jumlah	493.037.900,00	489.324.141,00	3.713.759,00

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10.240.000,00	7.040.000,00	3.200.000,00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	8.055.983,00	8.055.983,00	0,00
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	9.480.000,00	9.480.000,00	0,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	46.050.000,00	46.050.000,00	0,00
Jumlah	73.825.983,00	70.625.983,00	3.200.000,00

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	292.900.000,00	275.230.000,00	17.670.000,00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	11.105.000,00	11.105.000,00	0,00
Jumlah	305.655.000,00	287.985.000,00	17.670.000,00

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
--------	----------	-----------	----------------

Sub Bidang	Penanggulangan Bencana	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang	Keadaan Darurat	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang	Keadaan Mendesak	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00
Jumlah		144.000.000,00	144.000.000,00	0,00

16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penerimaan Pembiayaan	17.463.400,00	0,00	17.463.400,00
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	17.463.400,00	0,00	17.463.400,00

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
SILPA Tahun Sebelumnya	17.463.400,00	0,00	17.463.400,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	17.463.400,00	0,00	17.463.400,00

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	0,00
Setor Kembali Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	0,00	0,00	0,00

17. Aset Desa

Perolehan Aset Desa adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Tahun 2023	Tahun 2024	Penambahan/(Pengurangan)
Tanah	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	0,00	41.095.000,00	41.095.000,00
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	201.064.141,00	201.064.141,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap	0,00	242.159.141,00	242.159.141,00

18. Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Penambahan/ (Pengurangan)
Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	0,00

PEMERINTAH DESA WATOTUTU
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2024

KODE	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)
1	2	3	4
1.	ASET		
1.1.	Aset Lancar		
1.1.1.	Kas dan Bank	38.358.962,50	22.387.144,54
1.1.1.01.	Kas di Bendahara Desa	33.967.743,39	0,00
1.1.1.02.	Rekening Kas Desa	4.391.219,11	22.387.144,54
1.1.2.	Piutang	0,00	0,00
1.1.2.01.	Piutang Sewa Tanah	0,00	0,00
1.1.2.02.	Piutang Sewa Gedung	0,00	0,00
1.1.2.03.	Piutang Sewa Peralatan	0,00	0,00
1.1.2.04.	Piutang Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
1.1.2.05.	Piutang Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
1.1.2.06.	Piutang Alokasi Dana Desa	0,00	0,00
1.1.2.07.	Piutang Panjar Kegiatan	0,00	0,00
1.1.2.08.	Piutang Lain-lain	0,00	0,00
1.1.3.	Persediaan	0,00	0,00
1.1.3.01.	Persediaan Benda Pos dan Materai	0,00	0,00
1.1.3.02.	Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
1.1.3.03.	Persediaan Blangko dan Barang Cetak	0,00	0,00
1.1.3.04.	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Baterai	0,00	0,00
1.1.3.05.	Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00
1.1.3.06.	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih	0,00	0,00
1.1.3.07.	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman	0,00	0,00
1.1.3.08.	Persediaan Barang Untuk Dihilangkan kepada Masyarakat	0,00	0,00
	Jumlah Aset Lancar	38.358.962,50	22.387.144,54
1.2.	Investasi		
1.2.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	0,00	0,00
	Jumlah Investasi	0,00	0,00
1.3.	Aset Tetap		
1.3.1.	Tanah	0,00	0,00
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	41.095.000,00	0,00
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	201.064.141,00	0,00
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1.3.7.	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
1.3.8.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tetap	242.159.141,00	0,00

KODE	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)
1	2	3	4
1.4.	Dana Cadangan		
1.4.1.	Dana Cadangan	0,00	0,00
	Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00
1.5.	Aset Tidak Lancar Lainnya		
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
1.5.4.	Aktiva Tidak Berwujud	0,00	0,00
1.5.5.	Aset Lain-lain	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	280.518.103,50	22.387.144,54
2.	KEWAJIBAN		
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek		
2.1.1.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
2.1.2.	Hutang Bunga	0,00	0,00
2.1.3.	Hutang Pajak	0,00	0,00
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
2.1.5.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	0,00	0,00
2.1.6.	Hutang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
3.	EKUITAS		
3.1.	Ekuitas		
3.1.1.	Ekuitas	242.159.141,00	0,00
3.1.2.	Ekuitas SAL	38.358.962,50	22.387.144,54
	Jumlah Ekuitas	280.518.103,50	22.387.144,54
	JUMLAH EKUITAS	280.518.103,50	22.387.144,54
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	280.518.103,50	22.387.144,54

WAIMANA I, 31 Desember 2024

KEPALA DESA WATOTUTU

YOSEP DJULI LETON

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WATOTUTU
TAHUN ANGGARAN 2024**

Realisasi s.d 31/12/2024

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.441.663.623,00	1.438.923.631,00	2.739.992,00
	4.2.1.	Dana Desa	1.089.117.000,00	1.089.117.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	1.089.117.000,00	1.089.117.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	8.055.983,00	8.055.983,00	0,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	8.055.983,00	8.055.983,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	344.490.640,00	341.750.648,00	2.739.992,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	344.490.640,00	341.750.648,00	2.739.992,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.921.000,00	3.272.458,96	1.648.541,04
	4.3.6.	Bunga Bank	4.921.000,00	3.272.458,96	1.648.541,04
	4.3.6.01.	Bunga Bank	4.921.000,00	3.272.458,96	1.648.541,04
		JUMLAH PENDAPATAN	1.446.584.623,00	1.442.196.089,96	4.388.533,04
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES	447.529.140,00	434.289.148,00	13.239.992,00
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan	371.761.640,00	367.056.648,00	4.704.992,00
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	32.670.000,00	330.000,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	33.000.000,00	32.670.000,00	330.000,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	32.670.000,00	330.000,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	33.000.000,00	32.670.000,00	330.000,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.090.640,00	242.680.648,00	2.409.992,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	245.090.640,00	242.680.648,00	2.409.992,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D	245.090.640,00	242.680.648,00	2.409.992,00
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	245.090.640,00	242.680.648,00	2.409.992,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPD dan PPKD dll)	9.716.000,00	7.751.000,00	1.965.000,00
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.416.000,00	6.451.000,00	1.965.000,00
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.147.000,00	4.147.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.637.000,00	3.637.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	70.000,00	70.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	440.000,00	440.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPD dan PPKD	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00
1.1.4	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	444.000,00	434.000,00	10.000,00
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	300.000,00	300.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	144.000,00	154.000,00	(10.000,00)
1.1.4	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.4	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.4	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.4	5.3.	Belanja Modal	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
1.1.4	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
1.1.4	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.205.000,00	5.205.000,00	0,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.205.000,00	5.205.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	820.000,00	820.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00
1.1.8		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	22.350.000,00	22.350.000,00	0,00
1.1.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00
1.1.8	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00
1.1.8	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00
1.1.8	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	0,00	0,00
1.1.8	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	13.150.000,00	13.150.000,00	0,00
1.1.8	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	13.150.000,00	13.150.000,00	0,00
1.1.8	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.1.8	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.1.8	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan.	44.192.500,00	44.192.500,00	0,00
1.3.2		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	44.192.500,00	44.192.500,00	0,00
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.442.500,00	21.442.500,00	0,00
1.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.367.500,00	7.367.500,00	0,00
1.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	675.000,00	675.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.842.500,00	2.842.500,00	0,00
1.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	350.000,00	350.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2		4	5	6
1.3.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	14.075.000,00	14.075.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	14.075.000,00	14.075.000,00	0,00
1.3.2	5.3.	Belanja Modal	22.750.000,00	22.750.000,00	0,00
1.3.2	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	22.750.000,00	22.750.000,00	0,00
1.3.2	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
1.3.2	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,	31.575.000,00	23.040.000,00	8.535.000,00
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	600.000,00	600.000,00	0,00
1.4.2		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
1.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
1.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
1.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	13.270.000,00	13.270.000,00	0,00
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.270.000,00	13.270.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.620.000,00	6.620.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	5.080.000,00	5.080.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiat	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00
1.4.6		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Kuangan)	3.885.000,00	0,00	3.885.000,00
1.4.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.885.000,00	0,00	3.885.000,00
1.4.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.485.000,00	0,00	3.485.000,00
1.4.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	485.000,00	0,00	485.000,00
1.4.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.4.6	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	400.000,00	0,00	400.000,00
1.4.6	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	400.000,00	0,00	400.000,00
1.4.8		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.670.000,00	2.520.000,00	150.000,00
1.4.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.670.000,00	2.520.000,00	150.000,00
1.4.8	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	600.000,00	600.000,00	0,00
1.4.8	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	600.000,00	600.000,00	0,00
1.4.8	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2				
3	4	5	6		
1.4.8	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum	0,00	0,00	0,00
1.4.8	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	2.070.000,00	1.920.000,00	150.000,00
1.4.8	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	2.070.000,00	1.920.000,00	150.000,00
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	493.037.900,00	489.324.141,00	3.713.759,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	77.240.000,00	77.240.000,00	0,00
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	77.240.000,00	77.240.000,00	0,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.240.000,00	77.240.000,00	0,00
2.1.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	740.000,00	740.000,00	0,00
2.1.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	740.000,00	740.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	70.500.000,00	70.500.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	70.500.000,00	70.500.000,00	0,00
2.1.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	161.625.000,00	161.625.000,00	0,00
2.2.1		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	69.340.000,00	69.340.000,00	0,00
2.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	400.000,00	400.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.2.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00
2.2.1	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00
2.2.1	5.3.	Belanja Modal	11.740.000,00	11.740.000,00	0,00
2.2.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	11.740.000,00	11.740.000,00	0,00
2.2.1	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00
2.2.1	5.3.2.08.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	81.745.000,00	81.745.000,00	0,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.440.000,00	79.440.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	25.740.000,00	25.740.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	200.000,00	200.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	53.700.000,00	53.700.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	53.700.000,00	53.700.000,00	0,00
2.2.2	5.3.	Belanja Modal	2.305.000,00	2.305.000,00	0,00
2.2.2	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	2.305.000,00	2.305.000,00	0,00
2.2.2	5.3.2.05.	Belanja Modal Peralatan Dapur	2.305.000,00	2.305.000,00	0,00
2.2.3		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	10.540.000,00	10.540.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.540.000,00	7.540.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	300.000,00	300.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	200.000,00	200.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Biml	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.2.3	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.2.3	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.2.3	5.3.2.06.	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	212.621.424,08	209.310.141,00	3.311.283,08
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera san Jalan Lingkungan	212.621.424,08	209.310.141,00	3.311.283,08
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.746.743,73	8.246.000,00	500.743,73
2.3.11	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.746.743,73	8.246.000,00	500.743,73
2.3.11	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	3.260.000,00	2.760.000,00	500.000,00
2.3.11	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabu	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
2.3.11	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	286.743,73	286.000,00	743,73
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	203.874.680,35	201.064.141,00	2.810.539,35
2.3.11	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	203.874.680,35	201.064.141,00	2.810.539,35
2.3.11	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegi	5.904.625,35	5.904.000,00	625,35
2.3.11	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	25.148.600,00	25.147.800,00	800,00
2.3.11	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	172.821.455,00	170.012.341,00	2.809.114,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	30.000.000,00	29.598.000,00	402.000,00
2.4.1		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	30.000.000,00	29.598.000,00	402.000,00
2.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.598.000,00	402.000,00
2.4.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	900.000,00	900.000,00	0,00
2.4.1	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata	900.000,00	900.000,00	0,00
2.4.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	29.100.000,00	28.698.000,00	402.000,00
2.4.1	5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan ke	29.100.000,00	28.698.000,00	402.000,00
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan	11.551.475,92	11.551.000,00	475,92
2.6.1		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	11.551.475,92	11.551.000,00	475,92
2.6.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.551.475,92	11.551.000,00	475,92
2.6.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.051.475,92	7.051.000,00	475,92
2.6.1	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	7.051.475,92	7.051.000,00	475,92
2.6.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
2.6.1	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	73.825.983,00	70.625.983,00	3.200.000,00
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan	10.240.000,00	7.040.000,00	3.200.000,00
3.1.1		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00
3.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00
3.1.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
3.1.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	840.000,00	840.000,00	0,00
3.1.1	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	600.000,00	600.000,00	0,00
3.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
3.1.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
3.1.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	800.000,00	0,00
3.1.1	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	800.000,00	800.000,00	0,00
3.1.4		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
3.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
3.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
3.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.1.4	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.1.4	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	8.055.983,00	8.055.983,00	0,00
3.2.3		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya	8.055.983,00	8.055.983,00	0,00
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.055.983,00	8.055.983,00	0,00
3.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.250.983,00	4.250.983,00	0,00
3.2.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	25.983,00	25.983,00	0,00
3.2.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	25.000,00	25.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
3.2.3	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00
3.2.3	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00
3.2.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00
3.2.3	5.2.7.04.	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	9.480.000,00	9.480.000,00	0,00
3.3.1		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	9.480.000,00	9.480.000,00	0,00
3.3.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.480.000,00	9.480.000,00	0,00
3.3.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00
3.3.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00
3.3.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
3.3.1	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiat	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.3.1	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.3.1	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	46.050.000,00	46.050.000,00	0,00
3.4.1		Pembinaan Lembaga Adat	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00
3.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00
3.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
3.4.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	150.000,00	150.000,00	0,00
3.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
3.4.1	5.2.1.90.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	350.000,00	350.000,00	0,00
3.4.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00
3.4.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00
3.4.2		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
3.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
3.4.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
3.4.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
3.4.3		Pembinaan PKK	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00
3.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00
3.4.3	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	600.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	600.000,00	600.000,00	0,00
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	305.655.000,00	287.985.000,00	17.670.000,00
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	292.900.000,00	275.230.000,00	17.670.000,00
4.2.1		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	27.900.000,00	10.230.000,00	17.670.000,00
4.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.900.000,00	10.230.000,00	17.670.000,00
4.2.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.400.000,00	1.980.000,00	3.420.000,00
4.2.1	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabu	5.400.000,00	1.980.000,00	3.420.000,00
4.2.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	22.500.000,00	8.250.000,00	14.250.000,00
4.2.1	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata	22.500.000,00	8.250.000,00	14.250.000,00
4.2.2		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00
4.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00
4.2.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00
4.2.2	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00
4.2.3		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00
4.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00
4.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.2.3	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
4.2.3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
4.6.1		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
4.6.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
4.6.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
4.6.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4.6.1	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	150.000,00	150.000,00	0,00
4.6.2		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	0,00	0,00	0,00
4.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
4.6.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
4.6.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
4.6.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
4.6.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00
4.6.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
4.6.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	0,00	0,00	0,00
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	11.105.000,00	11.105.000,00	0,00
4.7.4		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	11.105.000,00	11.105.000,00	0,00
4.7.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.105.000,00	11.105.000,00	0,00
4.7.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.355.000,00	5.355.000,00	0,00
4.7.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.355.000,00	5.355.000,00	0,00
4.7.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	750.000,00	750.000,00	0,00
4.7.4	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	750.000,00	750.000,00	0,00
4.7.4	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.7.4	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00
		JUMLAH BELANJA	1.464.048.023,00	1.426.224.272,00	37.823.751,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(17.463.400,00)	15.971.817,96	(33.435.217,96)
6.		PEMBIAYAAN			
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	17.463.400,00	0,00	17.463.400,00
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	17.463.400,00	0,00	17.463.400,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	17.463.400,00	0,00	17.463.400,00
		JUMLAH PEMBIAYAAN	17.463.400,00	0,00	17.463.400,00
		SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	15.971.817,96	(15.971.817,96)

WAIMANA I, 31 Desember 2024
 KEPALA DESA WATOTUTU

 YOSEP DULI LETON

RINCIAN KEGIATAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

C.1. Rincian Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

No	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya /Jumlah
a	B	c	D
1	Peraturan Perundang-undangan	a.Peraturan Desa	4
		b.Peraturan Bersama Kepala Desa	0
		c.Peraturan Kepala Desa	6
		d.Keputusan Kepala Desa	26
2	Kependudukan	a.Jumlah Penduduk:	
		1) Laki-laki	662
		2) Perempuan	658
		3) Jumlah Kepala Keluarga	357
		4) Jumlah Anggota Keluarga	
		5) Jumlah Jiwa	1.320
		b.Jumlah Penduduk menurut:	
		1) Pendidikan Umum	
		2) Pendidikan Khusus	
		c.Jumlah Penduduk menurut mata pencaharian	
		1) PNS	
		2) TNI	
		3) Swasta	
3	Pertanahan	a.Status Tanah :	
		1) Sertifikat Hak Milik	
		2) Sertifikat Hak Guna Usaha	
		3) Sertifikat Hak Pakai	
		b.Luas Tanah :	
		1) Bersertifikat	
		2) Belum bersertifikat	
		3) Tanah Kas Desa	
		c.Peruntukan:	
		1) Jalan	

		1) Hutan	
		2) Rawa-rawa	
4	Manajemen Pemerintahan	a.Jumlah Aparat Pemerintahan Desa	
		1) PNS	0
		2) Non PNS	11 orang
		b.Jumlah Anggota BPD	9 orang
		c.Musyawarah Desa	5
		d.Musrenbangdesa	1
		e.Musyawarah BPD	2
5	Ketentraman & Ketertiban	a.Pembinaan Hansip:	
		1) Jumlah Anggota	4
		2) Alat Pemadam kebakaran	-
		3) Jumlah Hansip terlatih	2
		b.Keamanan & Ketertiban	
		1) Jumlah kejadian criminal	-
		2) Jumlah bencana alam	-
		3) Jumlah operasi penertiban	-
		4) Jumlah pos keamanan	-
		5) Jumlah kecelakaan remaja	-
6		a.Jenis Lembaga Kemasyarakatan	
		1) Rt/Rw – ada/tidak	Ada
		2) PKK – ada/tidak	Ada
		3) Karang Taruna-ada/tidak	Ada
		4) Pos Pelayanan Terpadu-ada/tidak	Ada
		5) LPM-ada/tidak	Ada
		b.Lembaga Kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan & pemberdayaan masyarakat-ada/tidak	Ada
		c.Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi	Ada

		masyarakat & sebagai mitra Pemerintah Desa-ada/tidak	
		d.Lembaga Kemasyarakatan diikutsertakan dalam pelaksanaan program sector & program Pemerintah Daerah-ya/tidak	Ada
		e.Lembaga Adat-ada/tidak	Ada
		f.Lembaga Adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakata-ada/tidak	Tidak

C.2. Rincian Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan

No	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/a da/tidak ada - ya/tidak
a	b	c	D
1	Sarana & Prasarana	a. Jalan Desa (km)	-
		b. Jalan kabupaten (km)	-
		c. Jalan Propinsi (km)	-
		d. Jalan Negara (km)	3
		e. Jembatan (buah)	5
		f. Kantor Kepala Desa (ada/tidak)	ada
2	Pembangunan Pendidikan	a.Tempat Pendidikan	
		Pendidikan Umum	
		1) Kelompok Bermain (jumlah)	Ada/1
		2) Taman Kanak-kanak (jumlah)	Ada/1
		3) Sekolah Dasar (jumlah)	Ada/1
		4) Sekolah Menengah (jumlah)	Tidak ada
		5) Akademi (jumlah)	Tidak ada
		6) Institut/Sekolah Tinggi (jumlah)	Tidak ada
		Tempat Pendidikan Khusus	
		1) Pendidikan Pesantren (jumlah)	Tidak ada

		2) Madrasah (jumlah)	Tidak ada
		3) Sekolah Luar Biasa (jumlah)	Tidak ada
		4) Balai Latihan Kerja (jumlah)	Tidak ada
3	Pembangunan Kesehatan	5) Kursus-kursus (jumlah)	Tidak ada
		a. Rumah Sakit Umum (jumlah)	Tidak ada
		b. Rumah Sakit Umum Swasta	Tidak ada
		c. Rumah Sakit Mata (jumlah)	Tidak ada
		d. Rumah Sakit Jiwa (jumlah)	Tidak ada
		e. Rumah Sakit Bersalin (jumlah)	Tidak ada
		f. Rumah Sakit Kusta (jumlah)	Tidak ada
		g. Rumah Bidan (jumlah)	Ada/1
		h. Puskesmas (jumlah)	1
		i. Apotik (jumlah)	Tidak ada
4	Pembangunan Sosial Budaya & Keagamaan	a.Sarana Olahraga	
		1) Lapangan Umum (jumlah)	1
		2) Lapangan Khusus	Tidak ada
		b.Sarana Kesenian/Kebudayaan	
		1) Gelanggang Remaja	Tidak ada
		2) Gedung Kesenian	Tidak ada
		3) Gedung tearter	Tidak ada
		4) Gedung Bioskop	Tidak ada
		c.Sarana Sosial	
		1) Panti Asuhan	Tidak ada
		2) Panti Pijat Tunanetra	Tidak ada
		3) Panti Wordo	Tidak ada
		4) Panti Jompo	Tidak ada
		d.Sarana Komunikasi	
		1) Radio Komunikasi	Tidak ada
		2) Papan Pengumuman	Ada/4
5	Pembangunan Lingkungan Hidup & Permukiman	a) Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan	Tidak ada
		b) Industry Besar	Tidak ada
		c) Industry Sedang	Tidak ada
		d) Industry Rumah Tangga	Tidak ada

	e) Tempat Rekreasi	Ada/1
	f) Hotel	Tidak ada
	g) Restoran/Rumah Makan	Tidak ada
	h) Saluran Irigasi	Tidak ada

C.3. Rincian Kegiatan Bidang Kemasyarakatan

No	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah
a	b	c	D
1	a.Sosialisasi Produk Hukum	a.Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1) UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Berapa kali)	1
		2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Uu. Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (berapa kali)	1
		3) Peraturan Menteri mengenai Desa (berapa kali)	1
		b.Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	
		1) Sosialisai Peraturan Daerah (berapa kali)	2
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati (berapa kali)	0
		c.Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa	
		1) Sosialisasi Peraturan Desa	2
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa	2
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa	0
2	Pelaksanaan Hak & Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak & Kewajiban Masyarakat	4
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa	0

		c. Masyarakat memperoleh informasi & pelayanan yang adil (ya/tidak)	Ya
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman & ketertiban (ya/tidak)	Ya
		e. Masyarakat partisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (ya/tidak)	Ya
3	Sosial Budaya Masyarakat	a.Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (berapa kali)	0
		b.Sosialisasi mengenai pengembangan olahraga & kesenian (berapa kali)	1
		c.Sosialisasi mengenai ketentraman & ketertiban masyarakat (berapa kali)	4
		d.Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (berapa kali)	1
		e.Sosialisasi mengenai bahaya narkoba & criminal (berapa kali)	0
		f.Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (berapa kali)	0
4	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (jumlah)	0
		b. Majelis Gereja (jumlah)	14
		c. Majelis Budha (jumlah)	0
		d. Majelis Hindu	0
		e. Remaja Mesjid	0
		f. Remaja Gereja	1
		g. Remaja Budha	0
		h. Remaja Hindu	0
5	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga	0
		b. Penampung pekerja ke luar negeri	0

2.4. Rincian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

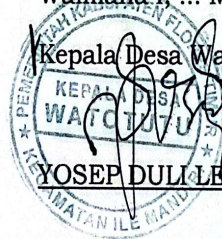
No	Sub Bidang	Kegiatan	
a	b	c	D
1	Sosialisasi & motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (berapa kali)	0
		b. Bidang Ekonomi	0
		c. Bidang Politik	0
		d. Bidang Lingkungan Hidup	0
2	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (berapa kali)	0
		b. Pemberdayaan Pemuda	0
		c. Pemberdayaan Olahraga	1
		d. Pemberdayaan Karang Taruna	0
3	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan	0
		b. Bidang Kesehatan	0

C.5. Rincian Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	0 Kegiatan
2.	Keadaan Darurat	Kegiatan Keadaan Darurat	00 Kegiatan
3.	Keadaan Mendesak	Kegiatan Keadaan Mendesak	1 Kegiatan

Waimana I. ... Maret 2024

Kepala Desa Watotutu



YOSEP DULLETON

**REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK
TAHUN 2024**

DESA : WATOTUTU
KECAMATAN : ILE MANDIRI
KABUPATEN : FLORES TIMUR
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR

No.	URAIAN	JUMLAH	
1.	PENDUDUK AWAL		
	a. Laki-laki	652	Orang
	b. Perempuan	651	Orang
	Jumlah (a + b)	1.303	Orang
2.	LAHIR		
	a. Laki-laki	3	Orang
	b. Perempuan	4	Orang
	Jumlah (a + b)	7	Orang
3.	MATI		
	c. Laki-laki	7	Orang
	d. Perempuan	3	Orang
	Jumlah (a + b)	10	Orang
4.	DATANG		
	e. Laki-laki	11	Orang
	f. Perempuan	8	Orang
	Jumlah (a + b)	19	Orang
5.	PINDAH		
	g. Laki-laki	16	Orang
	h. Perempuan	8	Orang
	Jumlah (a + b)	24	Orang
6.	PENDUDUK AKHIR		
	i. Laki-laki	663	Orang
	j. Perempuan	657	Orang
	Jumlah (a + b)	1.320	Orang

NO.	MUTASI ANTAR	PINDAH			DATANG		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1.	DESA	3	4	7	5	6	11
2.	KECAMATAN	3	2	5	2	2	4
3.	KABUPATEN	0	3	3	5	7	12
4.	PROVINSI	2	3	5	9	6	15
5.	NEGARA	2	0	2	3	1	4
	JUMLAH	10	12	22	24	22	46

Kepala Desa Watotutu

(Signature)

YOSEP DULI LETON

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ILE MANDIRI

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

: WATOTUTU
: ILE MANDIRI
: FLORES TIMUR
: NUSA TENGGARA TIMUR

REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK
TAHUN 2024

No.	URAIAN	JUMLAH			
1.	BERDASARKAN KEWARGANEGARAAN				
	A. WNI	663	Orang		
	- Laki-laki	657	Orang		
	- Perempuan				Orang
	Jumlah	1.320			
	B. WNA				
	- Laki-laki	0	Orang		
	- Perempuan	0	Orang		Orang
	Jumlah	0			
	C. WNI + WNA				
	- Laki-laki	663	Orang		
	- Perempuan	657	Orang		Orang
	Jumlah	1.320			
	D. Jumlah Penduduk Berdasarkan Keawarganegaraan				
	- Laki-laki	663	Orang		
	- Perempuan	657	Orang		Orang
	Jumlah (A+B+C)	1.320			
2.	BERDASARKAN AGAMA				
	A. Islam	0	Orang		
	- Laki-laki	0	Orang		
	- Perempuan				Orang
	Jumlah	0			
	B. Kristen				
	- Laki-laki	5	Orang		
	- Perempuan	8	Orang		Orang
	Jumlah	13			
	C. Katholik				
	- Laki-laki	658	Orang		
	- Perempuan	649	Orang		Orang
	Jumlah	1.307			
	D. Hindu				
	- Laki-laki	0	Orang		
	- Perempuan	0	Orang		Orang
	Jumlah	0			
	E. Budha				
	- Laki-laki	0	Orang		
	- Perempuan	0	Orang		Orang
	Jumlah	0			
	F. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama				
	- Laki-laki	663	Orang		
	- Perempuan	649	Orang		Orang
	Jumlah (A+B + C+ D+E+F)	1.320			
3.	TOTAL PENDUDUK				
	- Laki-laki	663	Orang		
	- Perempuan	657	Orang		Orang
	Jumlah	1.320			

Kepala Desa
KEPALA DESA
WATOTUTU
YOSEP DULI LETON



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ILE MANDIRI
DESA WATOTUTU

DAFTAR HADIR

Hari/tanggal
Kegiatan

: Senin, 14 April 2025

: Rapat Paripurna BPD dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		JABATAN	ALAMAT	PARAF	
		L	P				
1	Mitrus Wawo			Ket BPD	RT 09/DS III	1	2
2	Yosef Duli Letas			Kader		3	4
3	Petrus Eke Mukin						
4	Ramon M. Piran	L		Ketua RT 03	Dusun 3		6
5	Agnes K. Senona Lebau		P	NAKES	Dusun 3	5	
6	Klemensia L. Badin		P	Kader balia	Dusun 2		8
7	Maxine K. Weking		P	PKK	Dusun 2	7	
8	Maria Felixia N. Mukin		P	Dasawisma	Dusun 2		10
9	Rosalina Loti Badin		P	Pendidik TK	RT 05-DS II	9	
10	Yuliana S. Badin		P	PKK	Dusun II		12
11	THERESIA T. MUKIN		P	PKK	Dusun II	11	
12	Lusia Uron Badin		P	PKK	RT 04 - DS II		14
13	Anastasia P. Piran		P	PKK	RT 06 - DS II	13	
14	Maria P. L. Ritan		P	SEK II. PKK	RT 10 - DS III		16
15	Petrus da Watan	L		Ket RT 09	RT 09 DS III	15	
16	STEFANUS D. BADIN	L		KT RT 06	RT 06 DS II		18
17	Frangyanus P. Piran	L		KT RT 007	RT 007	17	
18	D. Mings Piran	L		RT 02	Dusun 3		20
19	Linda Ngegi	P	P	Kader Laki	RT 01	19	
20	Lusio Alice Lemuan	P	P	Kader PS 03	RT 01		22
21	Maria Letek Lebau		P	Ketua RT 03	RT 03	21	
22	Anastasia Un Uron		P	Kader pos	RT 08 DS III		24
23	Elisabeth Tenibon Hajan	P	P	Kader Laki	RT 1 Dusun 1	23	
24	Maria Wenge Weking		P	PKK	RT 08		

25	M. Floriano J. Hurin	✓	V	PKK	RT 09	25	26
26	M. Mado Weling	✓		Thermal	RT. 09	27	28
27	Petrus Uja Batin	✓		Orang biasa	Rt. 04	29	30
28	Basila S. Tiba	✓		Perdik pau	Rt 10	31	32
29	Humarus L. Pirin	✓		Perseksi kober	Rg 004	33	34
30	Harlanus B. Batin	✓		Kader	RT 01	35	36
31	Yosefin Delbo Koten	✓		KPM	RT 08	37	38
32	Sebastiana L.A. Huring	✓		Operator	Rt 005	39	40
33	Stephanus H. Plau	✓		Kadus I	RT 02/RT	41	42
34	Arnoldus Nedu Weling	✓		Kadus III	RT 03/DII	43	44
35	Yohanes Ama Bean	✓		Kadus II	RT 05/BSN II	45	46
36	Erastus Wile Nuan	✓		Kadus III	RT 01/DII	47	48
37	Uliana M. A. Koten	✓		Kadus Kemang	RT. 03/Din III	49	50
38	Emmanuel Haurin	✓		Angk. BPD	RT 08/DI III		
39	Henrikus E. Weling	L		Angk. BPD	RT. 05/DI		
40	Yoseph Ratu Batin	L		Angk. BPD	RT 05/DS II		
41	Mariano Jaja Weling	P	P	-4-	-11-		
42	Emmanuel B. Tukan	L		-1-	RT 01/DS I		
43	Gasper Badi Tukan	L		Sek BPD	RT 03/BSN I		
44	Alfonso 190 Leuan	L		Angk. BPD	RT 02/DS I		
45	Paulus K. Watson	L		A. BPD	RT 10/DS II		
46							
47							
48							
49							
50							

Kepala Desa Watuburu
KEPALA DESA
WATUBURU
YOSEF DULI LETON

NOTULEN

ari/Tanggal : Senin, 14 April 2025
aktu : Pukul 09.00 Wita - Selesai
mpat : Balai Desa Watotutu

- I. Pembukaan
 1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
 2. DOA
 3. Sambutan Ketua BPD :
 - ✓ Puji syukur pada Tuhan
 - ✓ Penyampaian LKPPD merupakan laporan tentang mekanisme penyelenggaraan pemerintah Desa dalam tahun anggaran
 - ✓ Membuka rapat Paripurna dengan resmi
- II. Agenda Inti :
 1. Pengantar LKPPD Tahun Anggaran 2024 oleh Kepala Desa Watotutu :
 - ✓ Puji syukur pada Tuhan
 - ✓ Menyapa Undangan dengan resmi
 - ✓ Lembaga BPD tentu sudah menelaah dokumen LKPPD situ Lembaga juga sudah mengetahui pencapaian di tahun 2024.
 - ✓ Acuan dari UU 6 dan Permendagri 43 mengharuskan LKPPD bisa disampaikan setelah 3 bulan Tahun Anggaran baru.
 - ✓ Menyampaikan LKPPD Tahun Anggaran 2024.
 2. Tata Tertib LKPPD oleh Lembaga BPD
 3. Snack
 4. Pembahasan LKPPD Tahun Anggaran 2024 (Yang memimpin : Paulus Kewaka Waton)
- Catatan/kritik/meminta Informasi :
 - ✚ Yosep Ratu Badin (BPD):
 - Perhatikan SK Guru TK dan PAUD serta menertibkan waktu kehadiran di sekolah.
 - Yosep D. Leton (Kades) :
 - SK sudah disiapkan oleh sekretariat.
 - ✚ Mariana J. Weking (BPD):
 - Stunting 2024 berjumlah 4 orang selalu ada anggaran untuk stunting, tetapi mengapa jumlah stunting tidak berubah?
 - Penjelasan proses perekrutan Kader ILP dan siapkan SK pemberhentian Kader Lama dan SK kader baru apabila sudah ditetapkan.
 - Yosep D. Leton (Kades) :
 - Anggaran sudah disiapkan oleh pemerintah tetapi kesadaran dari sasaran yang kurang mendukung, dan untuk tahun 2025 dianggarkan juga untuk rujuk bagi pasien (sasaran stunting yang tidak berubah)
 - Proses sudah berjalan dan seleksi administrasi sudah berjalan menunggu penentuan dari kepala Desa dan Ketua BPD.

✦ Mariana Jaja Weking (BPD) :

- Pemerintah Desa harus siap untuk memfasilitasi pemekaran RT dan juga melengkapi personil Linmas yang masih berjumlah 4 orang dari yang seharusnya adalah 10 orang untuk Desa Watotutu.

Yosep Duli Leton (Kades)

- Untuk pemekaran pemerintah siap untuk berproses dan untuk Linmas akan direkrut mengisi kekosongan personil ini.

✦ Yosef Ratu Badin :

- Insentif untuk semua lembaga Wajib direalisasikan dan pemerintah Desa harus tetap memonitor memastikan sampai di tangan masing-masing anggota lembaga.

Yosep Duli Leton :

- Proses realisasi Insentif untuk setiap lembaga mulai dari permintaan (SPP) dari Seksi dan seksi membayar kepada masing-masing lembaga melalui Bendahara Lembaga dan akan diteruskan ke masing-masing lembaga disertakan dengan tanda terima.

✦ Paulus Kewaka Waton :

- Apakah ada sisa material pembangunan
- Berapa sisa anggaran untuk pembangunan

Martinus Bera Badin (Kasie Pembangunan) :

- Material yang sisa adalah kerikil dan semen 3 sak, untuk kerikil sudah diamankan di halaman kantor desa.
- Sisa Anggaran rehabilitasi jalan adalah Rp. 3.311.283,08 ditambah dengan silpa kegiatan atau sisa anggaran lain disimpan di rekening kas desa.

✦ Ramon Mandiri Piran (Tokoh Agama)

- ✓ Rapat paripurna adalah forum yang terhormat sehingga BPD perlu menciptakan forum yang bergengsi dalam hal ini soal tata tempat dan ruangan serta seragam bagi yang menyelenggarakan.
- ✓ Aset desa yang mungkin tercecer harus dicatat dengan baik.
- ✓ Penataan Drainase dalam Desa harus dengan baik sehingga tidak menyebabkan kerusakan pada badan jalan
- ✓ Penyelesaian masalah yang di laporkan dari masyarakat masih banyak yang tidak terselesaikan.

✦ Emanuel Bai Tukan (BPD) :

- LKPPD tahun 2023 Lembaga meminta agar semua asset Desa Yang di sewakan agar di bukukan
- Di anggaran membiayai 10 orang Hansip tetapi yang aktif dan bertugas hanya 4 orang, apakah insentif di realisasikan 4 orang atau 10 orang

Petrus Duli Leton (Bendahara)

- Sewa pake asset desa di tangani oleh Bendahara Desa, dan asset yang di sewakan antara lain : Keyboard, Kursi dan Sewa Gedung. Jumlah uang yang Sewapake asset sampai dengansaatini adalah Rp. 4.255.000

Yuliana Martina A.Koten:

- Untuk realisasi nsentif Hansip hanya di berikan kepada 4 Orang yang aktif.

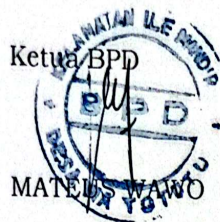
✚ Paulus Kewaka Waton :

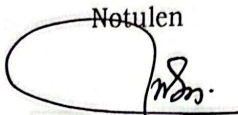
Untuk tahun yang datang di masukan didalam APBDes sebagai PAD.

BPD menerima LKPPD dan harus ada perbaikan, pembenahan atas catatan yang d berikan oleh Lembaga BPD.

III. Penutup :

Sambutan/ penegasan Ketua BPD dan menutup Rapat Paripurna.



Notulen

GASPAR BADI TUKAN

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA TENTANG LAPORAN KETERANGAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(LKPPD)
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024**

Dalam rangka musyawarah Desa tentang Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2024 di Desa Watotutu Kecamatan Ile Mandiri, Kabupten Flores Timur, Maka Pada :

Hari/Tanggal : Senin, 14 April 2025
Waktu : 10.00 Wita sampai Selesai
Tempat : Balai Desa Watotutu

Telah di selenggarakan musyawarah Desa tentang Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran 2024, yang di hadiri oleh BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa dan unsu-unsur lain sesuai dengan daftar hadir terlampir.

A. Agenda :

1. Penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pmerintahan Desa akhir tahun anggaran 2024
2. Tanya jawab dan diskusi
3. Penetapan dan penyepakatan laporan
4. Penandatanganan berita acara

B. Unsur Pimpinan dan Narasumber :

Pimpinan rapat : MateusWawo (Ketua BPD)
Notulen : Gaspar Badi Tukan (Sekretaris BPD)
Narasumber : YosepDuli Leton (Kepala Desa)

Setelah di lakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya peserta musyawarah memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir yang di ambil secara musyawarah mufakat yaitu :

1. Peserta Musyawarah menyetujui dan menyepakati Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2024
2. Hal lain terkait hasil musyawarah antara lain :
 - Pelaksanaan Musdes Pertanggungjawaban APBDesa Wajib di laksanakan pada bulan Maret tahun berjalan
 - Pada Tahun-tahun ke depan perlu adanya pendapatan bersumber dari Pendapatan Asli Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

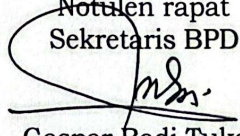
Waimana I, Tanggal tersebut di atas

Pimpinan rapat
Ketua BPD

Mateus Wawo

Mengetahui
Kepala Desa Watotutu

Yosep Duli Leton

Notulen rapat
Sekretaris BPD

Gaspar Badi Tukan